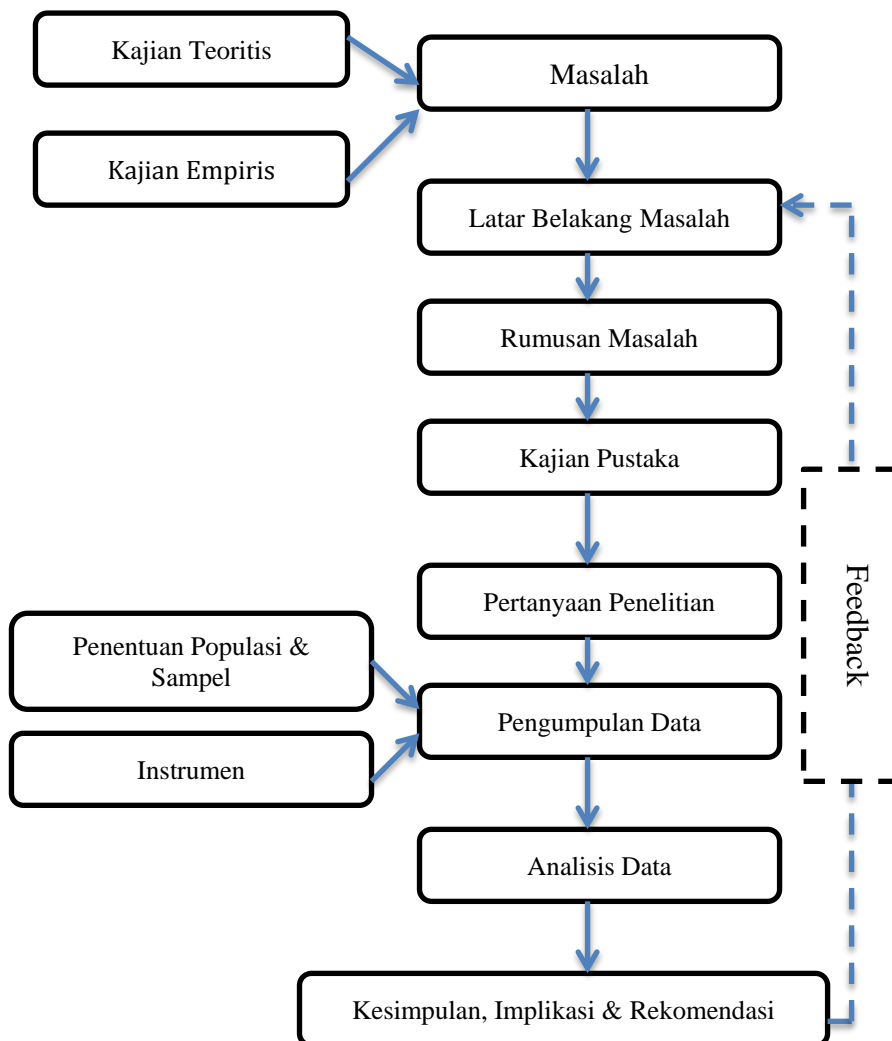


BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Burns and Grove (2003, hal. 195) mendefinisikan desain penelitian sebagai "cetak biru untuk melakukan studi dengan kontrol maksimum atas faktor-faktor yang dapat mengganggu validitas temuan". Lebih lanjut Creswell (2014, hal. 12) menyatakan bahwa desain penelitian adalah jenis penyelidikan dalam kualitatif, kuantitatif, dan pendekatan metode campuran yang memberikan arahan khusus untuk prosedur dalam desain penelitian.

Secara sederhana, desain penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1. Desain Penelitian

3.2. Metode dan Pendekatan Penelitian yang Digunakan

Menurut Burns dan Grove (2003 : 201), penelitian deskriptif dirancang untuk memberikan gambaran situasi sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk menjustifikasi praktek kebijakan yang terjadi saat ini, membuat penilaian dan juga untuk mengembangkan teori. Untuk tujuan studi penelitian ini, penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran hal-hal seputar analisa kebijakan PPDB dan implementasinya di kota Bandung.

Yin (2009, hal. 61) mengatakan bahwa tidak ada formula yang pasti dalam menentukan metode penelitian apa yang sesuai, namun pemilihan metode akan bergantung pada pertanyaan penelitian yang dimiliki. Jika pertanyaan penelitian lebih banyak mencari penjelasan mengenai keadaan yang terjadi (misal; mempertanyakan “bagaimana” atau “mengapa” fenomena sosial terjadi), maka penggunaan metode studi kasus menjadi relevan. Metode studi kasus juga relevan jika pertanyaan penelitian atas fenomena sosial yang diajukan memerlukan deskripsi yang mendalam dan ekstensif.

Studi kasus dipilih sebagai metode penelitian ini karena peneliti ingin memahami fenomena nyata secara mendalam dimana pemahaman ini nantinya akan mengarahkan peneliti dan para pembaca untuk memahami kondisi kontekstual yang terpenting atas implementasi kebijakan PPDB dan sistem tata kelolanya di Kota Bandung. Permasalahan PPDB yang terjadi di kota Bandung pada tahun 2015 merupakan suatu kasus kejadian yang terjadi tidak hanya di dalam satu kelompok sekolah atau kecamatan, melainkan mencakup seluruh sekolah di setiap kecamatan di Kota Bandung.

Pendekatan kualitatif digunakan pada penelitian ini karena sifat penelitian yang eksploratif untuk menemukan sesuatu yang baru sebagai hasil atas analisa kebijakan PPDB di kota Bandung. Beberapa karakteristik yang ada pada penelitian ini mengarah pada karakteristik penelitian kualitatif yang disebutkan oleh beberapa peneliti, seperti Creswell (2013), Hatch (2002) dan Marshall & Rossman (2011) dikutip dalam Creswell (2014), dimana (1) *pengumpulan data diambil dari para partisipan yang mengalami langsung* atas permasalahan yang diangkat dalam studi penelitian, yaitu pelaksanaan PPDB tahun 2015 dan 2016 di

Kota Bandung. (2) *Peneliti mengumpulkan data secara mandiri* melalui studi literatur/dokumen, meneliti perilaku atau menginterview partisipan dan tidak menggunakan instrumen yang dibuat oleh peneliti lain. (3) *Peneliti mengumpulkan beragam format data*; seperti wawancara, observasi, studi dokumen dan informasi audiovisual dan tidak bergantung pada satu sumber data. (4) *Pemahaman partisipan*, pada keseluruhan proses penelitian kualitatif, peneliti selalu berfokus untuk mempelajari pemahaman yang dipegang oleh para partisipan mengenai masalah dan isu yang dibahas bukan pada pemahaman yang dimiliki oleh peneliti. Seperti yang dikatakan Denzin & Lincoln (2005, hal.10) penelitian kualitatif menekankan pada kasus-kasus yang terjadi pada realitas sosial, hubungan yang intens antara peneliti dan apa yang diteliti, serta kendala situasional yang membentuk pertanyaan penelitian. Para peneliti menekankan penelitian yang sarat nilai (*value-laden*) dimana mereka mencari jawaban atas pertanyaan yang menekankan bagaimana pengalaman sosial diciptakan dan diberikan makna.

3.3. Data yang Diperlukan

Berikut adalah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini:

1. Isi kebijakan sistem seleksi PPDB Kota Bandung tahun 2015 dan 2016.
2. Implementasi sistem seleksi PPDB sekolah negeri di Kota Bandung.
3. Sistem tata kelola seleksi PPDB sekolah negeri di Kota Bandung.
4. Kriteria penentuan diterima atau tidak diterimanya calon siswa.
5. Jumlah calon siswa yang mengikuti seleksi PPDB sekolah negeri di kota Bandung pada tahun 2015 dan 2016, baik dari jalur non akademik maupun akademik.
6. Daya tampung/ketersediaan jumlah kursi yang tersedia di sekolah negeri di kota Bandung.
7. Sosialisasi yang diterapkan pada PPDB 2015 di Kota Bandung?
8. Tingkat pemahaman para pihak yang terlibat terhadap proses seleksi PPDB 2015 di Kota Bandung?
9. Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan sistem seleksi PPDB sekolah negeri di Kota Bandung.

10. Langkah – langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Bandung cq Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam mengatasi permasalahan yang timbul pada pelaksanaan sistem seleksi PPDB sekolah negeri di Kota Bandung.

3.4. Lokasi & Objek Penelitian

Lokasi dan objek penelitian akan berada di kota Bandung, tepatnya di beberapa SMA Negeri, SMP Negeri maupun Swasta, serta Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung.

3.5. Jadwal Penelitian

Berikut adalah jadwal penelitian yang dilakukan peneliti:

	Kegiatan	Tanggal
1.	Sidang Proposal	15 Januari 2016
2.	Penyusunan Instrumen Penelitian	16 – 22 Januari 2016
3.	Kegiatan ke Lapangan (Wawancara, Observasi)	22 Jan – 29 Feb 2016
4.	Studi Dokumen & Pengumpulan materi	22 Jan – 29 Feb 2016
5.	Verifikasi & Pengujian Data	1 – 15 Maret 2016
6.	Pengolahan & Analisis Data	16 – 31 Maret 2016
7.	Penulisan Laporan Ilmiah	1 – 30 April 2016

3.6. Populasi & Sampel Penelitian

1. Pemerintah Kota Bandung (Walikota/Sekda/Kesra diwakili oleh Anggota Tim Perumus Kebijakan PPDB Kota Bandung).
2. Dinas Pendidikan Kota Bandung (Kadisdik, Kabid, Pengawas Sekolah).
3. Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah, Orang Tua dan Siswa serta Masyarakat Pemerhati PPDB Kota Bandung.

3.7. Instrumen Penelitian

1. Wawancara
2. Studi Dokumen
3. *Focus Group Discussion*
4. Angket

Berikut adalah Tabel 3.1. yang menjelaskan mengenai operasionalisasi konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

Tabel 3.1. Operasionalisasi Konsep

Kategori	Sub Kategori	Indikator	Ukuran
Implementasi Kebijakan	1. Sosialisasi	1. Uji Publik, Jumlah Pertemuan, Media	Baik,
	2. Pemahaman	2. Isi Kebijakan (aturan), sistem tata kelola, syarat pendaftaran	Cukup, Kurang
	3. Komunikasi	3. Transparansi	
	4. Kesulitan	4. Waktu, efektifitas, objektivitas	
	5. Peran pemerintah	5. Aktif, netral, fungsional	

3.8. Proses Pengumpulan Data

Berikut adalah matriks pengumpulan data yang dilakukan peneliti berdasarkan pada operasionalisasi konsep yang telah disebutkan sebelumnya yang disajikan dalam tabel 3.2. sebagai berikut:

Tabel 3.2. Matriks Pengumpulan Data

Tujuan	Data Primer			Data Sekunder
	<i>Indepth Interview</i>	Obser -vasi	Survei	
Mencari data berkenaan dengan implementasi kebijakan	<p><u>Alat:</u> pedoman wawancara</p> <p><u>Substansi:</u> seluruh informasi berkaitan dengan implementasi kebijakan PPDB di Kota Bandung</p> <p><u>Informan:</u> tokoh yang mewakili pihak pemerintah daerah kota Bandung (team perumus kebijakan, kepala bidang PSMAC dan pengawas Dinas Pendidikan Kota Bandung), tokoh yang mewakili panitia pelaksana PPDB (kepala sekolah) dan informan lain yang terkait.</p> <p>Pemilihan informan: purposive dan <i>snowball</i></p>	Tidak diperlu kan	<p><u>Alat:</u> kuesioner</p> <p><u>Substansi:</u> berkenaan dengan persepsi dan pemahaman masyarakat tentang implementasi kebijakan PPDB di Kota Bandung.</p> <p><u>Sampel:</u> random purposive (disajikan dalam bentuk <i>google forms</i> yang disebar secara acak melalui media sosial bagi para panitia pelaksana dan orang tua serta siswa calon peserta didik yang terlibat pada saat PPDB berlangsung.</p>	<p><u>Substansi:</u> data-data penunjang, baik berkenaan dengan implementasi kebijakan PPDB maupun tentang isi kebijakan PPDB.</p> <p><u>Sumber:</u> pers lokal, blog, data statistik peserta didik yang mendaftar PPDB, FGD Kepala Sekolah Swasta</p>

(Rujukan: Patton, 1990; Newman, 1997; dan Creswell, 2004)

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

1. mengidentifikasi partisipan, lokasi, dokumen serta materi visual lainnya dengan cara *purposefully selection* (dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian). Lokasi dan partisipan, menurut Miles & Huberman dalam Creswell (2014, hal. 189), dapat mencakup empat aspek seperti; (a) *the setting* (lokasi dimana penelitian akan dilaksanakan), (b) *the actors* (siapa yang akan diobservasi atau diinterview), (c) *the events* (apa yang dilakukan oleh orang-orang yang diobservasi atau diinterview), serta (d) *the process* (keadaan atau peristiwa yang berkembang pada partisipan di lokasi penelitian).
2. Merujuk kepada apa yang ditawarkan oleh Creswell (2013), jumlah sampel pada sebuah studi kasus minimal melibatkan empat sampai lima kasus yang relevan. Pada penelitian ini, sebagai peneliti dan penulis, saya akan mengangkat kasus-kasus yang terjadi di seputar permasalahan kebijakan PPDB dan implementasinya. Dan menggali informasi dari berbagai kalangan yang terlibat, mulai dari pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pihak yang terimbas kebijakan PPDB ini.
3. Mengindikasikan tipe data yang akan dikumpulkan. Pada penelitian analisis kebijakan PPDB dan implementasinya, berikut adalah tipe/instrumen data yang saya pilih lengkap dengan proses pengambilan datanya:
 1. Wawancara
 - melakukan wawancara terstruktur pada sampel yang mewakili pihak pemerintah daerah kota Bandung dan Dinas Pendidikan Kota Bandung (dimana list pertanyaan telah dibuat sebelumnya), merekam seluruh proses wawancara dan mencatat serta mentranskripsikan hasil wawancara. Contoh list pertanyaan adalah:
 - Bagaimana Kebijakan PPDB tahun 2015 disusun?
 - Siapakah yang menyusun kebijakan tersebut?

- Apa isi dari kebijakan tersebut?
- Apa tujuan dibuatnya kebijakan tersebut?

2. Studi Dokumen

- mengumpulkan jurnal-jurnal serta artikel-artikel berkaitan dengan PPDB
- menganalisa dokumen publik (misal: Dokumen Peraturan Walikota No. 361 Tahun 2015, Dokumen Arsip Notulasi Rapat Sosialisasi & Pelaksanaan PPDB 2015, Dokumen Peraturan Walikota No. 610 Tahun 2016 di kota Bandung)
- Mengumpulkan serta menganalisa data mengenai implementasi PPDB yang bersumber dari website, pesan surat elektronik, media sosial seperti *blog*, *facebook*, *twitter*, *path* maupun *instagram*.

3. *Focus Group Discussion*

- Melakukan wawancara *focus group* pada sampel yang terdiri dari Kepala Sekolah, Tim Perumus Perwal tentang Kebijakan PPDB Kota Bandung, Kepala Bidang PSMP dan PSMAK, dan Kepala Dinas Pendidikan, merekam seluruh proses wawancara dan mencatat serta mentranskripsikan hasil wawancara. Contoh materi pertanyaan adalah:
 - Apakah Kebijakan PPDB disosialisasikan sebelum pelaksanaan?
 - Apa kriteria penerimaan siswa baru pada kebijakan PPDB 2015?
 - Bagaimana proses seleksi dalam pelaksanaan PPDB ini dilakukan?
 - Persyaratan apa saja yang perlu dilengkapi?
 - Seperti apakah kriteria penerimaan peserta didik dalam kebijakan PPDB tahun 2015 ini?
 - Hambatan apa saja yang dirasakan oleh para pelaksana maupun orang tua dan siswa yang mendaftar pada proses PPDB tahun 2015?

4. Angket

Angket disebar dalam format link yang terkoneksi dengan *Google Form* melalui sosial media seperti *path*, *facebook*, *twitter* dan *Whatsapp* yang merekam seluruh hasil jawaban responden. Angket terbagi menjadi 2 bagian; yang pertama dengan subyek responden kalangan para pelaksana PPDB (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Staff TU baik sekolah negeri maupun swasta. Sementara angket yang kedua ditujukan bagi para orang tua dan siswa yang mengikuti proses PPDB 2015 dan 2016 serta wakil dari masyarakat pengamat dan pemerhati proses PPDB 2015 dan 2016 di Kota Bandung.

3.9. Verifikasi & Pengujian Data

Peneliti melakukan kode untuk mengidentifikasi unit informasi yang terpisah dari teks dan menyusun serta mengorganisasikan data berdasarkan persamaan makna (Lincoln & Guba dalam Rudestam & Newton, 1992). Dalam proses verifikasi, seluruh data yang terkumpul, diolah secara manual *koding per item*. Lalu dilakukan reduksi hasil data, dipilih data-data yang menjawab pertanyaan penelitian untuk selanjutnya dilakukan konfirmasi atau memeriksa kesesuaian data-data setelah proses reduksi dilakukan. Data tersebut diinterpretasi secara menyeluruh. Kemudian peneliti melakukan triangulasi dengan cara mencari responden yang sederajat untuk mengkonfirmasi jawaban-jawaban dari data yang ada dengan cara mengajukan pertanyaan yang sama.

3.10. Pengolahan & Analisis Data

Dari data-data yang telah terkonfirmasi, peneliti menganalisis dan menafsirkan maksud dan maknanya lalu dihubungkan dengan masalah penelitian. Secara umum, analisa data ini dimaksudkan untuk menjelaskan data berupa teks transkrip wawancara, *focus group discussion*, dan data gambar serta grafik dari angket hingga pada akhirnya dapat membuat kesimpulan dan rekomendasi atas penelitian mengenai analisis kebijakan PPDB dan implementasinya di Kota Bandung.

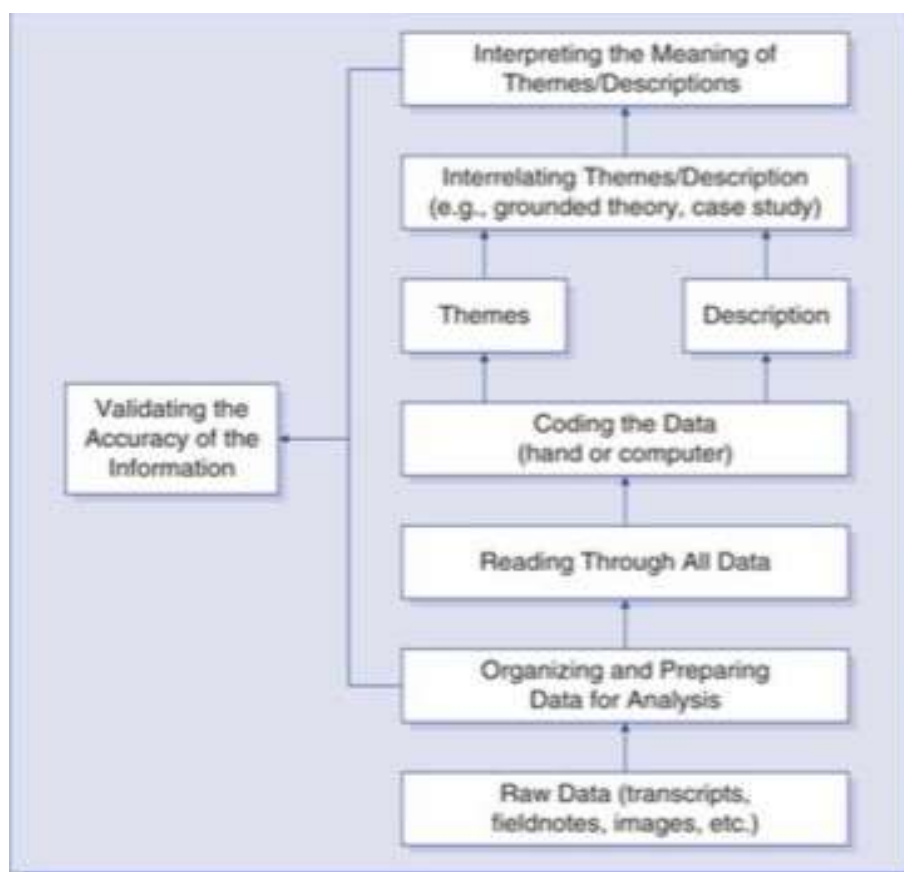
Rita Anggorowati, 2016

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH NEGERI DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dalam penelitian ini tahap analisa data yang digunakan adalah tahapan yang dikemukakan oleh Creswell (2014, hal. 197 – 200) yang terdiri dari pengumpulan data mentah, pengorganisasian dan persiapan data untuk dianalisa, membaca keseluruhan data, melakukan *coding* data lalu membaginya menjadi kelompok tema dan deskripsi. Kemudian tema dan deskripsi yang telah dibuat tadi, disusun dan disajikan dalam bentuk narasi kualitatif yang memberikan informasi deskriptif mengenai hasil yang diperoleh dari setiap responden. Langkah terakhir adalah membuat intepretasi penelitian kualitatif atas segala temuan dan hasil yang ditemukan.

Detil tahap analisa data dimaksud dapat dilihat pada gambar 3.2. berikut ini:



Gambar 3.2. Data Analysis pada Penelitian Kualitatif
Sumber: Creswell (2014, hal. 197)

Lalu pemaparan data yang dilakukan peneliti diupayakan untuk membahas setiap data mengenai implementasi kebijakan dan sistem tata kelola seleksi PPDB 2015 di kota Bandung lengkap dengan isi kebijakan, sistem tata kelola serta

Rita Anggorowati, 2016

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH NEGERI DI KOTA BANDUNG

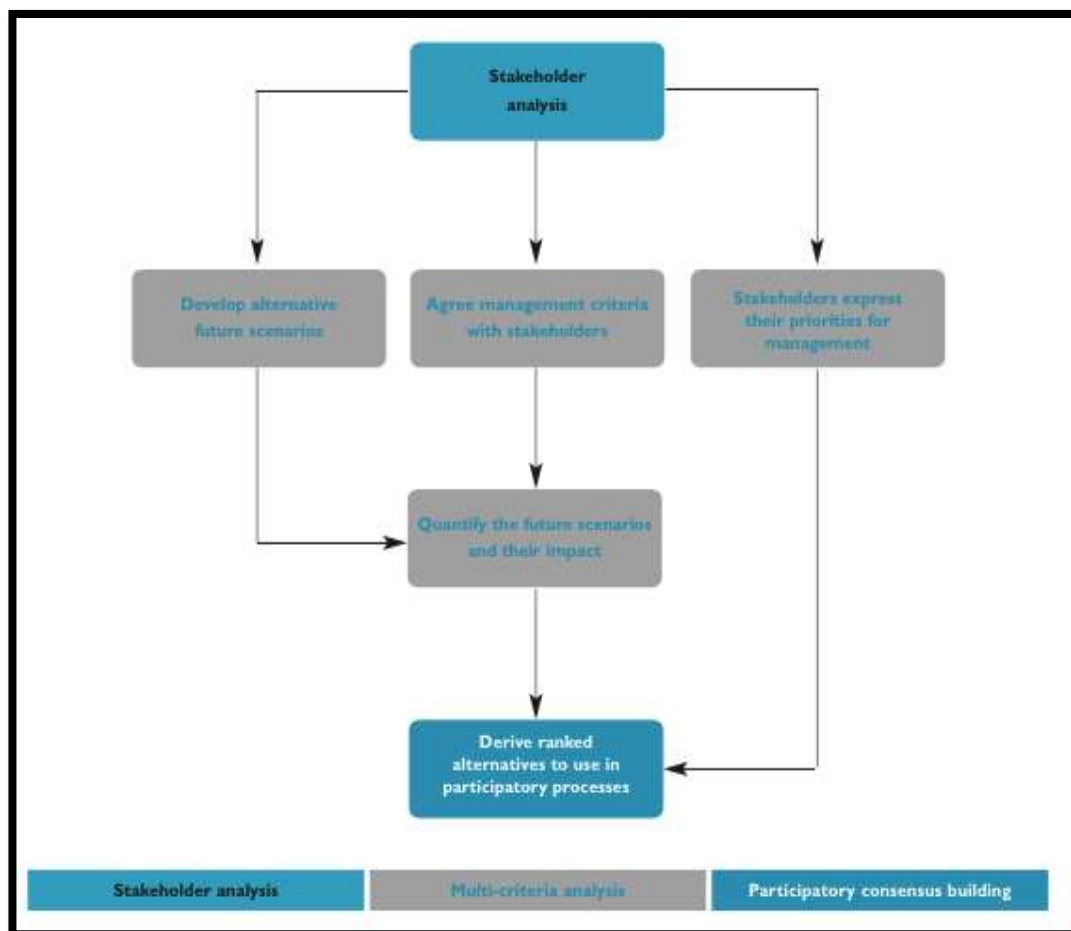
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas proses seleksi PPDB di kota Bandung dengan menggunakan metode analisa *Trade-off* dengan dua kegiatan analisa yaitu analisa *Stakeholder* dan Multi Kriteria. Dimana hasil analisisnya menjadi hal utama pada bagian pembahasan.

Kismartini (2004, hlm. 402-416) mengemukakan bahwa adanya tarik menarik kepentingan dari masing-masing stakeholder, baik antara masyarakat dengan institusi maupun antara institusi satu dengan institusi lainnya memerlukan suatu formulasi atau langkah-langkah analisis kebijakan publik untuk mencapai penyelesaian agar masing-masing stakeholder dapat terwadahi sesuai dengan kepentingannya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa *Trade-off analysis* menawarkan bantuan untuk mendapatkan sebuah kebijakan publik yang akomodatif melalui proses analisis kebijakan publik yang akomodatif melalui proses analisis kebijakan publik dengan melibatkan banyak ragam stakeholder dengan banyak kepentingan. Dalam pengelolaan berbagai kepentingan ini, harus dilakukan secara bijak dan berpikir menang-menang.

Brown, Tompkins & Adger (2001, hlm. 8) mengungkapkan bahwa analisis *Trade-off* adalah proses dimana stakeholder terlibat untuk mempertimbangkan manfaat dari strategi manajemen yang berbeda, dan secara eksplisit menentukan prioritas manajemen (lihat Gambar 3.3). Hal ini membutuhkan informasi untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pemangku kepentingan tentang dampak dari kegiatan yang berbeda dari berbagai sumber. Informasi tersebut lalu diorganisir, sehingga dapat dimengerti dan bisa digunakan. Hal ini adalah ciri utama dari analisis *trade-off*. Analisis ini adalah alat yang dapat membantu para pengambil keputusan dalam memahami penggunaan sumber konflik dan preferensi stakeholders dalam manajemen.

Gambar 3.3. Proses Analisis *Trade-Off*

Sumber: Brown, Tompkins & Adger (2001, hlm. 8)

Dalam buku tersebut, ketiganya berpendapat bahwa analisis *trade-off* dimulai dengan analisis pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan, dan penilaian konflik untuk menentukan kepentingan para stakeholder dan konflik penggunaan yang potensial terjadi. Informasi dari analisis dapat digunakan untuk menghasilkan skenario pembangunan masa depan. Stakeholder yang diidentifikasi sebagai aktor utama untuk proses ini kemudian terlibat untuk menyepakati satu set kemungkinan dampak skenario alternatif masa depan (dampak ini disebut sebagai kriteria manajemen) sebagai sumber penyelidikan. Informasi ini menjadi dasar untuk analisis multi kriteria. Informasi dikumpulkan untuk menentukan dampak dari

skenario masa depan alternatif pada setiap kriteria manajemen. Informasi tersebut disusun dalam 'Tabel Dampak', yaitu tabel yang berisi semua informasi.

Dalam pelaksanaan analisis *trade-off*, proses diawali dengan analisis *stakeholder*. Analisis *stakeholder* menurut Brown, Tompkins & Adger (*Ibid*) adalah sistem pengumpulan informasi dari individu atau sekelompok orang yang berpengaruh di dalam memutuskan, mengelompokkan informasi, dan menilai kemungkinan konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok kepentingan dengan areal yang akan dilakukan *trade-off*. Sedangkan metode pemilihan alternatif digunakan metode Multi-kriteria, yakni : suatu set alternatif pilihan yang didasarkan pada suatu kriteria penilaian.

Lebih lanjut, mereka mengemukakan bahwa analisis multi kriteria digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Metode analisis multi kriteria menghasilkan peringkat atas skenario alternatif di masa depan, dari hasil paling tidak disukai hingga hasil yang paling disukai. Dampak dari preferensi manajemen stakeholder pada peringkat ini kemudian dinilai. Stakeholder yang terlibat diminta untuk mengungkapkan prioritas mereka untuk manajemen dalam proses berulang menggunakan penyebaran informasi, membangun kepercayaan dan teknik pengembangan konsensus . Pada setiap tahap proses berulang ini, pendapat stakeholder dimasukkan dalam bentuk bobot, yang dimasukkan ke dalam model analisis multi kriteria. Setiap kali peringkat dari hasil yang dihasilkan diedarkan ke semua kelompok pemangku kepentingan lainnya. Sekali lagi, menggunakan teknik pengembangan konsensus, stakeholder diberi kesempatan untuk mempertimbangkan kembali prioritas mereka dengan mempertimbangkan prioritas yang diungkapkan kelompok lain. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengungkapkan kepada kelompok pemangku kepentingan di bidang konsensus bilamana mereka sudah setuju, dan untuk menunjukkan kepada pengambil keputusan opsi pembangunan masa depan yang akan didukung oleh pemangku kepentingan.

Akhirnya, semua kelompok stakeholder dibawa bersama-sama dalam sebuah lokakarya konsensus untuk mengidentifikasi keputusan manajemen tertentu yang mereka dukung, dan tindakan apa yang mereka dapat lakukan untuk berkontribusi pada hasil yang diinginkan.

Analisis *trade-off* dapat dilakukan di berbagai tingkat partisipasi dan informasi yang tersedia. Kedalaman analisis tergantung pada sumber daya yang tersedia untuk mengeluarkan ide dan gagasan pada saat penyelidikan.

Berikut adalah tahapan analisis *trade-off* melalui tahapan analisis stakeholder dan tahapan analisis multi kriteria yang dikemukakan oleh Brown, Tompkins & Adger (2001):

a. Analisis Stakeholder

Analisis *Stakeholder* adalah sistem pengumpulan informasi dari individu atau sekelompok orang yang berpengaruh di dalam memutuskan, mengelompokkan informasi dan menilai kemungkinan konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok berkepentingan dengan areal dimana akan dilakukan *trade-off*.

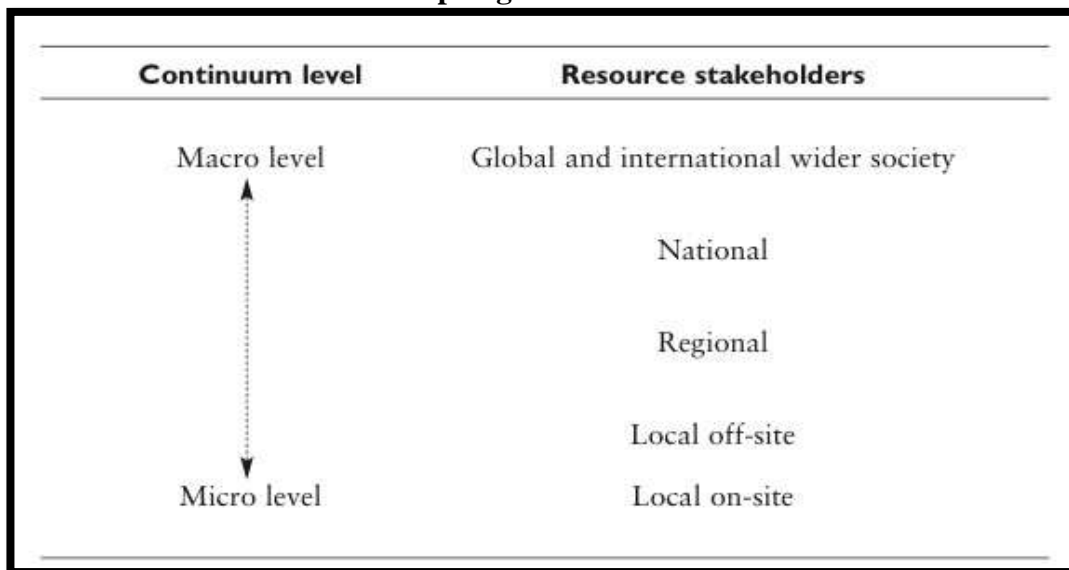
Untuk menentukan analisis partisipatif stakeholder (pemangku kepentingan) diperlukan beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi Stakeholder

Untuk mengidentifikasi stakeholder, metoda *Continuum* dari mulai tingkat mikro ke tingkat makro digunakan (Gambar 3.4.), dimana pengelompokkan stakeholdernya adalah sebagai berikut:

- Tingkat Internasional, adalah organisasi non pemerintahan yang mewakili jaringan internasional.
- Tingkat Nasional, terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok; yaitu: Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pakar.
- Tingkat Regional, terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu: Pimpinan Instansi Pemerintah dan Pengelola Swasta. Dalam kasus penelitian ini, pimpinan instansi pemerintahnya adalah Wali Kota Bandung dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Tingkat Lokal, terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu: Pemerintah, Swasta, LSM dan Masyarakat. Dalam kasus penelitian ini, stakeholder pemerintah diwakili oleh kepala sekolah, LSM pemerhati pendidikan dan orang tua calon peserta didik serta calon peserta didik mewakili masyarakat.

Gambar 3.4. Tipologi Identifikasi Stakeholder

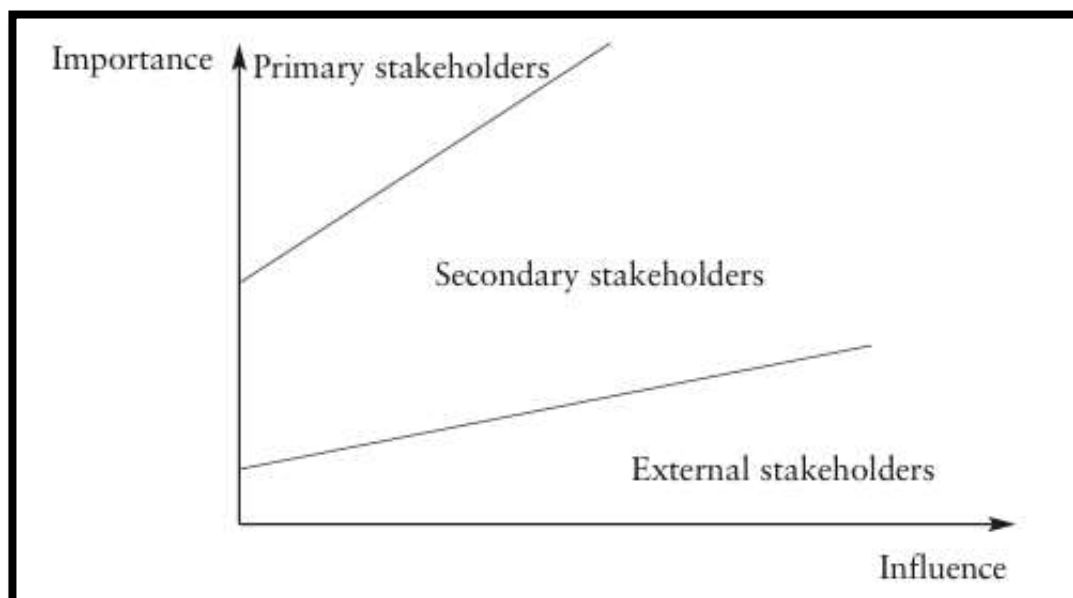


Sumber: Brown, Tompkins & Adger (2001, hlm. 21)

2. Menentukan Kategori Stakeholder dalam Kelompok Prioritas

Pengelompokkan stakeholder berdasarkan pada tingkat kepentingan (*importance*) dan pengaruhnya (*influence*) terhadap proses pengambilan keputusan (Gambar 3.5.), yaitu:

Gambar 3.5. Kategori Stakeholder Berdasarkan Tingkat Kepentingan & Pengaruh

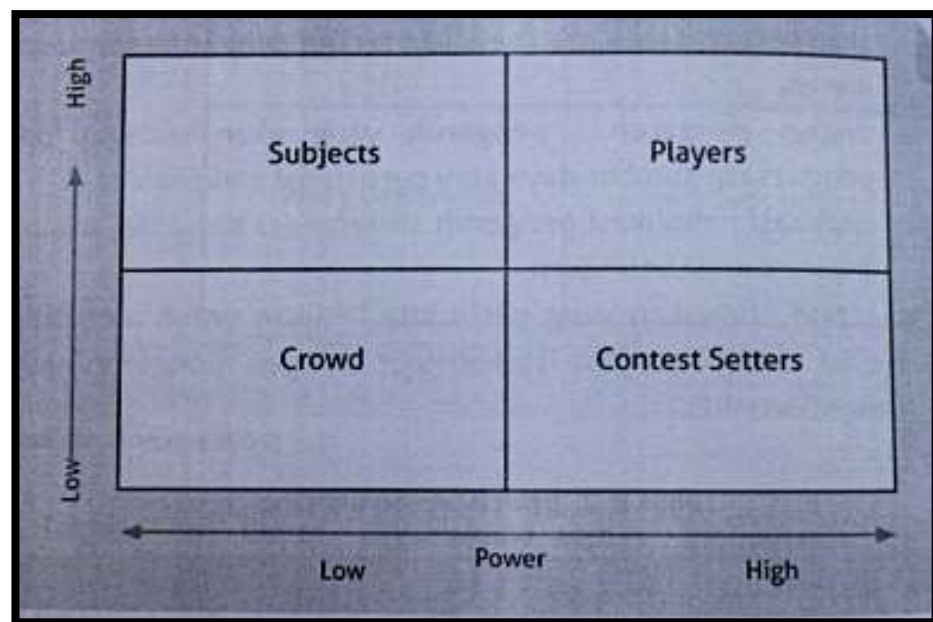


Sumber: Brown, Tompkins & Adger (2001, hlm. 24)

- *Primary stakeholder*, yaitu pihak yang tingkat kepentingan tinggi dengan pengaruh yang rendah dalam proses penentuan kebijakan. Pada kasus penelitian ini, yang menjadi tokohnya adalah orang tua dan siswa calon peserta didik yang mendaftarkan diri pada seleksi PPDB di Kota Bandung.
- *Secondary stakeholder*, yaitu pihak yang tingkat kepentingan dan pengaruh dalam proses penentuan kebijakan memiliki porsi yang sama. Mereka mungkin saja berperan langsung pada proses dan berpengaruh pada keberhasilan ataupun kegagalan secara integral. Pada kasus penelitian ini, yang menjadi tokohnya adalah panitia pelaksana penerimaan seleksi PPDB Kota Bandung, kepala sekolah swasta se Kota Bandung, serta masyarakat pemerhati pendidikan.
- *External stakeholder*, yaitu pihak yang tingkat kepentingan rendah dengan pengaruh yang tinggi dalam proses penentuan kebijakan. Pada kasus penelitian ini, yang menjadi tokohnya adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, tim perumus kebijakan PPDB Kota Bandung, dan Wali Kota Bandung sebagai aktor utama.

Senada dengan pemaparan di atas, Lembaga Administrasi Negara dalam Modul Pelatihan Analisis (2015, hlm. 128) menyebutkan bahwa *power* serta *interest* menjadi fokus utama dalam teknis analisis model *grid*. *Power* bisa berasal dari potensi stakeholder untuk mempengaruhi kebijakan atau organisasi yang berasal dari kekuasaan berbasis kedudukan atau sumber daya mereka dalam organisasi, atau mungkin pengaruh mereka yang berasal dari kredibilitas mereka sebagai pemimpin atau ahli. Sedangkan *interest* seorang stakeholder terhadap sebuah kebijakan atau proyek tertentu akan diukur melalui tingkat keaktifannya.

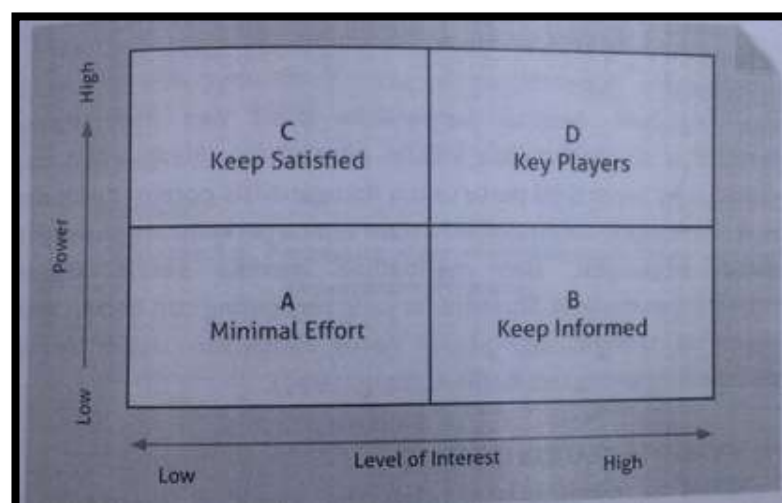
Gambar 3.6. Kuadran *Power vs Interest Grid*



Sumber: Eden & Ackermann dalam Modul Pelatihan Analis Kebijakan (2015, hlm. 128)

Setelah dilakukan pemetaan *power* serta *interest* dari tiap stakeholder, kemudian peneliti menentukan intervensi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap stakeholder yang sudah berhasil dipetakan. Gambaran terkait intervensi yang harus dilakukan terhadap stakeholder yang telah diketahui *power* serta *interest*-nya dapat dilihat dari gambar 3.7 berikut ini:

Gambar 3.7. Jenis Aktor Dalam Setiap Kuadran



Sumber Mintzberg dalam Modul Pelatihan Analisis Kebijakan (2015, hlm. 129)

Dari Gambar 3.7. dapat dilihat bahwa stakeholder di sektor A tidak memiliki *interest* yang tinggi dalam keputusan juga *power* yang rendah untuk mempengaruhi dan memberikan dampak yang besar. Namun demikian, kelompok ini harus tetap dijaga untuk mendapatkan informasi dalam batas yang diperlukan. Para Panitia Pelaksana Seleksi PPDB 2015 berada di kuadran ini.

Sementara stakeholder di sektor B memiliki *interest* yang tinggi dalam merespon semua keputusan meskipun sebenarnya mereka tidak memiliki *power* yang besar untuk mempengaruhi. Kelompok ini bisa dijadikan sebagai pendukung atas suatu kebijakan, itu sebabnya penting untuk menginformasikan isu-isu yang mereka minati. Dalam penelitian ini, kedudukan para orang tua dan calon peserta didik peserta seleksi PPDB 2015 berada di kuadran ini.

Stakeholder di sektor C biasanya adalah pihak legislatif. Mereka berperilaku pasif dan menunjukkan rendahnya interest dalam urusan kebijakan. Menghadapi tipe stakeholder seperti ini, perlu dianalisa potensi minat dan reaksi setiap kelompok dalam setiap perkembangan yang terjadi dan melibatkan mereka sesuai dengan kepentingan mereka. Stakeholder terpenting berada pada sektor D, sebagai *key player*, mereka harus dilibatkan dalam semua perkembangan yang terjadi. Dalam penelitian ini, Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Walikota berada di kuadran ini. (Mitzberg dalam Modul Pelatihan Analisis Kebijakan (2015, hlm. 130)

3. Mekanisme Partisipatif dari Beberapa Kelompok Stakeholder

Dalam proses partisipatif diperlukan beberapa mekanisme berbeda-beda terhadap beberapa kelompok stakeholder, seperti:

- Wawancara secara individu terhadap tim perumus kebijakan PPDB Kota Bandung dan panitia pelaksana penerimaan seleksi PPDB Kota Bandung yang diwakili oleh Kepala Bidang PSMK, Pengawas Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Kepala Sekolah SMPN di Kota Bandung.

- *Focus Group Discussion* terhadap Kepala Sekolah SMA Swasta di Kota Bandung sebagai pihak yang terdampak oleh adanya kebijakan seleksi PPDB di Kota Bandung.
- Pengisian kuesioner terhadap panitia pelaksana penerimaan seleksi PPDB Kota Bandung dan orang tua dan siswa calon peserta didik yang mendaftarkan diri pada seleksi PPDB di Kota Bandung

Berbagai pendekatan mekanisme partisipatif ini diperlukan untuk menarik keterlibatan para stakeholder (pemangku kepentingan) secara efektif guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Analisis Multikriteria

Analisis multikriteria menyediakan kerangka analisis yang mengkaitkan antara isu permasalahan dan tujuan pengelolaan di masa datang. Tahapan yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis multikriteria adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Skenario, Kriteria dan Penilaian Dampak

Mengacu pada Brown, Tompkins & Adger (2001), peneliti membuat skenario ke depan yang mampu menjelaskan dampak saat pelaksanaan kebijakan PPDB itu dilaksanakan.

Dalam penentuan kriteria dan pendugaan dampak digunakan 6 kriteria, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas dan kelayakan. Dari setiap kriteria itu, kemudian masing-masing memiliki beberapa sub kriteria.

Dunn (2003) menyatakan bahwa ada korelasi antara kriteria dan penggunaan rasionalitas, seperti terlihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Keterkaitan antara Kriteria dan Penggunaan Rasionalitas

Kriteria	Esensi	Rasionalitas
Efektifitas	Menseleksi berbagai alternative untuk dijadikan rekomendasi kebijakan berdasarkan pertimbangan apakah alternative yang direkomendasikan memberikan hasil (akibat) yang maksimal	Rasionalitas teknis
Efisiensi	Menseleksi berbagai alternatif untuk dijadikan	Rasionalitas

	rekomendasi kebijakan berdasarkan pertimbangan apakah alternative yang rasio efektifitas biayanya lebih tinggi dari batas tertentu (efisiensi marginal)	ekonomi
Kecukupan	Menseleksi berbagai alternative untuk dijadikan rekomendasi kebijakan dengan melihat seberapa jauh alternative tersebut dapat memenuhi tingkat kebutuhan yang dipermasalahkan.	
Kesamaan (Equity)	Menseleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi kebijakan dengan didasarkan pertimbangan apakah alternative yang direkomendasikan menghasilkan lebih banyak distribusi yang adil terhadap sumber yang ada dalam masyarakat.	Rasionalitas legal dan sosial
Responsifitas (Responsiveness)	Menseleksi berbagai alternative untuk dijadikan rekomendasi kebijakan dengan melihat seberapa jauh alternative tersebut dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu	Rasionalitas sosial
Kelayakan (Appropriateness)	Menseleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi kebijakan berdasarkan pertimbangan apakah alternative yang direkomendasikan merupakan pilihan yang layak	Rasionalitas substantive

Sumber: Dunn (2003)

Data yang telah terkumpul dari hasil analisis stakeholder menjadi bahan analisis multikriteria. Analisis multikriteria memerlukan dua masukan data yaitu (1) matriks dampak; dan (2) kumpulan bobot yang menyertai efek-efek dari nilainya. Matriks dampak mewakili nilai indikator dari kriteria yang diperkirakan untuk masing-masing skenario. Indikator yang akan dinilai dapat diambil dari berbagai sumber yaitu pendapat pakar, pengambil keputusan dan masyarakat yang diperoleh dari hasil analisis stakeholder.

Kemudian penyusunan peringkat pilihan dilakukan dengan pembobotan dampak. Peringkat dengan bobot tinggi dari pilihan pengembangan akan dibandingkan dengan peringkat yang tidak berbobot sebagai masukan pengambilan keputusan.

Penilaian dampak dapat diperoleh dari hasil diskusi dengan para

Rita Anggorowati, 2016

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH NEGERI DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pakar dan stakeholder maupun dari data sekunder. Analisis stakeholder adalah sistem pengumpulan data dengan berbagai cara dengan melibatkan stakeholder dalam diskusi agar mereka mengungkapkan pilihannya baik melalui interview, diskusi atau kuesioner dengan menggunakan pendekatan partisipasi dan disajikan dalam bentuk Tabel Dampak (*The Effects Table*).

Patton & Sawicki (1993) berpendapat bahwa proses analisis kebijakan merupakan evaluasi alternative kebijakan dari sisi teknis, ekonomi, dan politik, dikaitkan dengan implementasinya. Ada beberapa tantangan dalam menetapkan alternative kebijakan. Pertama, konflik antara rasionalitas individu dengan rasionalitas kelompok. Kedua, masalah kriteria-kriteria berganda (*multiple criteria*). Untuk menyajikan kriteria alternatif kebijakan dapat menggunakan patokan tabel 3.4. berikut ini:

Tabel 3.4. Tabel Dampak Alternatif Kebijakan

Tujuan	Kriteria	Alternatif Kebijakan		
		Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3
1	Kriteria 1.1	Prediksi, dampak & Penilaian	Prediksi, dampak & Penilaian	Prediksi, dampak & Penilaian
	Kriteria 1.2	Prediksi, dampak & Penilaian	Prediksi, dampak & Penilaian	Prediksi, dampak & Penilaian
	Kriteria 1.3	Prediksi, dampak & Penilaian	Prediksi, dampak & Penilaian	Prediksi, dampak & Penilaian
2	Kriteria 2.1	Prediksi, dampak & Penilaian	Prediksi, dampak & Penilaian	Prediksi, dampak & Penilaian
	Kriteria 2.2	Prediksi, dampak & Penilaian	Prediksi, dampak & Penilaian	Prediksi, dampak & Penilaian
	Kriteria 2.3 dst	Prediksi, dampak & Penilaian	Prediksi, dampak & Penilaian	Prediksi, dampak & Penilaian

Sumber: Patton & Sawicki (1993)

2. Penentuan Skor

Kriteria yang telah ada kemudian ditelaah terlebih dahulu untuk dilihat apakah termasuk ke dalam pengembangan yang bermanfaat (*benefit*) atau merupakan suatu kerugian (*cost*) sebelum penentuan skala dilakukan. Brown, Tompkins & Adger (2001) menyatakan bahwa setiap ukuran kriteria akan memberikan makna yang berbeda.

Rita Anggorowati, 2016

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH NEGERI DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Setiap kriteria (ekonomi, politik dan sosial budaya) memiliki nilai skor terendah 0 dan tertinggi 100. Artinya, kriteria yang paling tidak disukai mendapat nilai 0, sebaliknya, kriteria yang paling disukai mendapatkan nilai 100.

3. Mengidentifikasi Bobot Peringkat Skenario

Dalam pembobotan peringkat skenario terdapat dua tahapan, yaitu: pembobotan kriteria dan pembobotan sub kriteria. Bobot dari kriteria menunjukkan prioritas pengelolaan, sedangkan bobot dari sub kriteria menunjukkan tingkat kepentingan dari sub kriteria dalam kelompok kriteria.

Dengan mengalikan ranking prioritas manajemen dengan skor yang ada pada masing-masing kriteria, bila dijumlahkan akan menghasilkan bobot dari skenario. Hasil dari evaluasi kebijakan dengan metode ini adalah peringkat skenario, sehingga dapat dipilih skenario mana yang paling diinginkan.

4. Melibatkan Pilihan Stakeholder dalam Penyusunan Peringkat dari Skenario Kebijakan

Jika pilihan dari kelompok stakeholder berbeda-beda dalam identifikasi dan analisis, maka akan menghasilkan prioritas yang akan mengubah posisi ranking dari skenario sebelumnya. Pilihan stakeholder dari prioritas manajemen yang berbeda dapat dilakukan dengan berbagai cara. Informasi yang dikumpulkan dapat berbentuk data yang berbeda seperti: data nominal, ordinal, interval atau rasio akan diubah menjadi ranking dari masing-masing skenario.

5. Penilaian

Sebagai tahap akhir akan dilakukan penilaian secara menyeluruh terhadap skenario-skenario yang ada. Kinerja dari berbagai skenario diperbandingkan, kemudian dikomunikasikan sebagai bentuk hasil simpulan penelitian.